



scan kode QR ini untuk membaca online

Optimalisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM Melalui Kemitraan

Perubahan Mindset Dan Culture Set Menuju Percepatan Reformasi Birokrasi.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Balitbang HAM Tahun 2013

Laporan Kegiatan Publikasi Produk Balitbang HAM.

Rapat Kerja Nasional Tahun 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sosialisasi Program Aksi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

PENTINGNYA PENGOLAHAN INFORMASI DATA HAM



Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah, terutama penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HAM. Berbagai bukti empiris, menunjukkan bahwa penyusunan program untuk pencegahan dan penanggulangan HAM di Indonesia menuntut adanya pengetahuan mengenai karakteristik setiap wilayah (provinsi, kabupaten/kota) yang pada kenyataannya sangat beragam antar wilayah.

Keragaman karakter yang dimiliki oleh setiap wilayah memberikan implikasi dalam pembentukan hukum yang berwawasan HAM dan harus sesuai dengan hukum nasional serta sekaligus sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh setiap wilayah. Dalam hubungan ini, maka keragaman karakter setiap wilayah perlu direkam atau dicatat secara sistematis yang dikhususkan dalam satu kegiatan, yaitu Pemetaan HAM.

Pengumpulan data permasalahan HAM yang benar hanya mungkin dilakukan dengan adanya upaya verifikasi terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dengan melibatkan unsur-unsur yang terlibat di bidang HAM seperti bidang HAM Kanwil Kemenkumham, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pusham Universitas, Pemerintah Provinsi dan lembaga HAM lainnya. (ke hal.8)

OPTIMALISASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM MELALUI KEMITRAAN

Penyelenggaraan Rakornis Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 bertempat di Jakarta dengan mengangkat tema “Optimalisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan HAM melalui Kemitraan”. Tema ini dilandasi pemikiran bahwa kondisi ideal yang diinginkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil penelitian dan pengembangan HAM membutuhkan kemitraan

HAM dalam mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan (Hukum dan HAM); serta membahas program kemitraan yang dapat dibangun oleh Balitbang HAM dengan stakeholders terkait agar hasil penelitian dan pengembangan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan harapan-harapan di atas itulah, salah satu langkah awal dengan melakukan koordinasi yang baik kepada stakeholders di pusat

maupun di daerah, baik dalam melaksanakan penelitian maupun dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan HAM. Dengan demikian lembaga ini dapat bersinergi dan bermanfaat bagi seluruh stakeholders dan mampu memberikan berbagai alternatif solusi yang mendukung pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah.



dengan berbagai pihak.

Adapun sasaran pelaksanaan Rakornis adalah untuk mendorong peran Balitbang HAM dalam mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan (Hukum dan HAM); mendorong peran yang dapat dilakukan oleh stakeholders terkait yang dalam hal ini Balitbangda/Bappeda/Biro Hukum, Pusat Studi HAM baik negeri maupun swasta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, untuk mencapai tujuan dan sasaran terkait peran dan fungsi penelitian dan pengembangan maka diperlukan langkah-langkah strategis melalui Rapat Koordinasi Teknis dengan fokus penguatan lembaga kelitbang dalam rangka optimalisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia.

PERUBAHAN MINDSET DAN CULTURE SET MENUJU PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Pencapaian visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia secara optimal antara lain dipengaruhi oleh sinerginya unit kerja antar bidang dan bagian serta kompetensi sumber daya manusia pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih berkualitas, merupakan unsur penting dalam percepatan reformasi birokrasi. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, sekalipun dihadapkan pada berbagai kendala. Pemahaman tentang konsep-konsep teoritis perubahan mindset dan culture set dan kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam pemberian layanan tugas pokok dan fungsi merupakan tuntutan yang diharapkan berdampak pada kemampuan individu dalam berkompetensi kepada hal positif.

Perubahan mind set dan culture set menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang paling sulit diwujudkan. Budaya kerja selama ini yang hanya menunggu perintah, pasif, cepat merasa puas, menghindari beda pendapat harus mengalami perubahan menjadi melakukan terobosan, proaktif, tidak mudah puas dan berani beda pendapat untuk menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Tantangan perubahan mind set dan culture set tersebut dirasakan sangat berat karena terlanjur mewarisi mind set dan culture set pada masa sebelumnya yang merupakan paradigma yang membentuk sikap dan perilaku dengan pola-pola tindakan konvensional yang berorientasi pada jabatan dan kekuasaan dengan berbagai perwujudan tindakannya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM telah berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut dapat terlihat dengan membandingkan mind set dan culture set pegawai Badan Litbang HAM sebelum adanya reformasi birokrasi dengan sesudah adanya reformasi birokrasi

di tahun 2010.

Melalui kegiatan penguatan kelembagaan Badan Penelitian dan



Pengembangan HAM yang dilaksanakan setiap tahun dan terakhir diselenggarakan di Bogor pada tanggal 26-28 februari 2013 ini diharapkan dapat membangun pola kebersamaan diantara pegawai, menumbuhkembangkan komitmen dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas secara optimal, meningkatkan motivasi pegawai untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta dapat mewujudkan optimalisasi kinerja melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Kegiatan di isi dengan pembekalan materi oleh DR. Agus Sutiyono, M.M., dari Human Capital Development Expert, Universitas Negeri Jakarta. Di sesi lain acara diisi dengan kegiatan outbond serta lintas alam yang diikuti oleh seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BALITBANG HAM TAHUN 2013

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut perubahan Peraturan Perundang-undangan di Bidang pengelolaan Keuangan Negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor

kaidah-kaidah tertentu yang akuntabel berorientasi pada hasil.

Melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan kiranya dapat menjadi landasan komitmen sebagai penyelenggara negara yang tanggap mengantisipasi perubahan dalam upaya me-

ningkatkan transparansi yang efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan negara. Dampak dari perubahan yang positif akan diperlihatkan kemudian yaitu tidak lagi ditemukannya penyimpangan/kebocoran keuangan oleh aparatur negara.

Bimbingan Teknis ini di laksanakan pada tanggal 20-22 Februari 2013 Di Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM serta staff pengelola

keuangan Balirbang HAM dengan dihadiri oleh narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dari hasil Bimbingan Teknis ini diharapkan akan melahirkan tenaga-tenaga ahli pengelola keuangan yang profesional dan berintegritas, sehingga tata kelola keuangan dapat berjalan dengan lebih baik dan semakin dapat dipertanggungjawabkan.



1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keberadaan empat landasan yuridis tersebut membawa implikasi terhadap pengelolaan keuangan yang harus lebih baik dalam rangka mendukung terwujudnya "good governance". Pengelolaan Keuangan negara yang profesional, terbuka dan bertanggung jawab perlu penerapan

PUBLIKASI KEGIATAN BALITBANG HAM

Makassar



Pelaksanaan kegiatan pameran dan publikasi produk Balitbang HAM dilaksanakan secara rutin di daerah-daerah guna mempromosikan hasil yang telah dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Dalam rangka kegiatan sosialisasi Buku Pedoman Pendidikan Politik yang di laksanakan oleh Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik yang bertempat di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Humas dan Informasi Sekretariat Balitbang HAM berkesempatan melaksanakan kegiatan Pameran. kegiatan pameran tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 yang dihadiri oleh para kader dan anggota partai politik, LSM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Antusiasme peserta dalam mengunjungi pameran ini sangat tinggi terbukti dengan banyaknya permintaan buku hasil penelitian yang tidak dapat terpenuhi. Sebagai antisipasi kurangnya permintaan buku, tim pameran berkesempatan mensosialisasikan aplikasi *e-book* yang dikembangkan oleh Balitbangham. Aplikasi ini berisi kumpulan buku-buku hasil penelitian dalam bentuk digital yang dapat dibaca secara online. Dan bagi yang ingin memiliki buku terbitan Balitbang HAM dapat mengajukan permohonan tertulis atau melalui email ke balitbangham@ymail.com

Kalimantan Barat

Dalam rangka mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan HAM,



Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menyelenggarakan pameran/publikasi. Kegiatan pameran ini berlangsung bersamaan dengan acara seminar Hak atas Kesamaan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Puslitbang Ke-

lompok Khusus Badan Penelitian dan Pengembangan HAM bekerjasama dengan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4 April 2013 di Pontianak ini memamerkan hasil penelitian yang telah dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM pada tahun 2012 dalam bentuk buku. Pada kegiatan pameran kali ini hasil produk yang dipamerkan sudah didistribusikan dalam bentuk *e-book* yang dapat diakses melalui portal Balitbang HAM dengan alamat ebook.balitbangham.go.id. Selain memamerkan produk hasil penelitian, publikasi ini juga menyediakan Newsletter, Majalah, Jurnal HAM, dan Poster Balitbang HAM yang dibagikan secara cuma-cuma kepada peserta seminar.

SOSIALISASI PROGRAM AKSI DAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Jakarta, 1 Pebruari 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengadakan sosialisasi Program Aksi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Acara tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Konsinyasi Penyusunan Konsep Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwujudan program percepatan untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Program aksi merupakan kegiatan unggulan masing-masing unit yang memberikan manfaat nyata pada masyarakat serta mendukung percepatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah, merupakan pengendali manajemen, dan harus selaras dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang pelaksanaannya dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk tahun 2013 ini penilaian diarahkan menjadi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB adalah cara yang diang-



gap tepat untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang, praktis, efektif, efisien, dan handal.

Setiap instansi pemerintah harus melaksanakan PMPRB, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali melaksanakan penilaian dan melaporkan penilaian mandiri secara online atas capaian dan progres dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tujuan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

1. Memudahkan instansi Pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan;
2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian PAN dan RB untuk menyusun profil

- nasional pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Bagi Instansi pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi masing-masing;
 4. Memfasilitasi *bench learning* (saling belajar dan tukar pengalaman) mengenai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi pemerintah.
3. Sebagai alat untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara efektif dan berkelanjutan;
 4. Mendorong terjadinya kompetisi yang positif di antara instansi pemerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Manfaat Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah :

1. Memberikan sistem penilaian mandiri dan baku yang mampu menginformasikan tahapan atau tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah;
2. Memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan pro-

RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI



Jakarta - Pada tanggal 14 Februari 2013 telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

tif untuk Indonesia yang lebih baik lagi” diharapkan dapat mensinergikan seluruh satuan kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan. Acara diisi dengan pembekalan materi dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Di akhir acara dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan HAM, penyerahan hasil Rakernas dan ditutup oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013. Acara dibuka oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 15 Februari 2013 di istana Wakil Presiden dengan diikuti oleh pimpinan unit eselon 1 dan seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema “ Membangun Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Produk-

(sambungan dari hal. 1)

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 26-28 Maret 2013 di Jakarta ini dihadiri oleh 33 peserta yang terdiri dari pejabat eselon IV dan fungsional umum yang membidangi masalah HAM dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 provinsi. Dalam melaksanakan bimbingan teknis



ini peserta diberi pengarahan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dan pengolahan informasi data HAM oleh Nugroho DKS dari Universitas Indonesia.

Peserta juga dibekali dengan pelatihan penggunaan aplikasi Pemetaan HAM secara online. Didalam pelatihan ini peserta di bimbing secara langsung untuk melakukan input data permasalahan HAM. Di dalam melakukan input data setiap peserta diberi hak akses (*account*) untuk mengelola data yang telah di input. Dan guna menghindari kesalahan input, setiap user hanya bisa mengolah data di wilayahnya masing-masing.

Data yang diperoleh dari masing-masing Kanwil nantinya akan diverifikasi lebih lanjut oleh tim Balitbang HAM dan dipublikasikan agar bisa diakses masyarakat.

Pengarah :

DR. Mualimin, Abdi, S.H., M.H.
(Kepala Balitbang HAM)

Penanggung Jawab :

Ir. Maruahal Simanjuntak, S.H., M.M.
(Sekretaris Balitbang HAM)

Ketua :

Drs. Halasan Pardede
(Kepala Bagian Humas & Informasi)

Redaktur :

Sabir, Agus Priyatna, Chairina

Diterbitkan Oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan - Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2525015, 2526438 Fax. (021) 2526678, 2526438

web : www.balitbangham.go.id ,

e-mail : balitbangham@ymail.com